

**PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI DAN PENGALAMAN AUDIT
TERHADAP PENDETEKSIAN KECURANGAN DALAM LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Constantinus Nurak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
constantinusnurak@gmail.com

Yohana Febiani Angi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
yfangi@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, independensi, dan pengalaman audit terhadap pendeteksian kecurangan. Penelitian ini dilakukan pada auditor di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi NTT. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 51 auditor. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program aplikasi SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan pengalaman audit berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan, sedangkan variabel independensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Hasil uji F (simultan) menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, dan pengalaman audit secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, dan pengalaman audit mampu menjelaskan variabel dependen (pendeteksian kecurangan) sebesar 76,7%, sedangkan sisanya 23,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

Kata Kunci: Kompetensi, Independensi, Pengalaman Audit, Pendeteksian Kecurangan

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of competence, independence, and audit experience on fraud detection. This research was conducted on Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) for the province of East Nusa Tenggara. The number of samples used in this research were 51 auditors. Data collection was carried out by questionnaire using simple random sampling method. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis using the SPSS 25 application program. The result showed that the competence and audit experience have a significant impact on the fraud detection, while the independence variable do not have a significant impact on fraud detection. The result of the F test (simultaneous) showed that competence, independence and audit experience together have a significant impact on fraud detection. The coefficient of determination showed that competence, independence, and audit experience are able to explain the dependent variable (fraud detection) by 76,7%, while the remaining 23,3% is influenced by other variables outside the research.

Key Words: Competence, Independence, Audit Experience, Fraud Detection

PENDAHULUAN

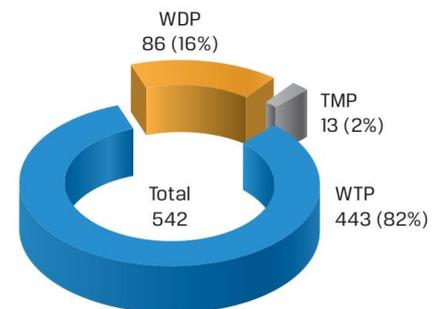
Perkembangan reformasi yang terjadi dalam segala bidang yang didukung oleh masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah menyebabkan lahirnya otonomi daerah sebagai salah satu bentuk tuntutan reformasi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dengan adanya reformasi tersebut, perlu adanya pertimbangan yang mendasari diselenggarakannya otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5, menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan otonomi daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan juga aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Praktik kecurangan terjadi dalam berbagai sektor salah satunya sektor pemerintahan. Berdasarkan hasil survei *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) yang menunjukkan bahwa sektor pemerintahan berada di urutan kedua dalam kasus kecurangan dengan persentase sebesar 33,9%. Kecurangan merupakan salah satu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang menggunakan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pemerintahan daerah dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun

2019 memuat hasil pemeriksaan atas 542 (100%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari 542 LKPD tahun 2018 yang wajib diserahkan. Terhadap 542 LKPD tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan 443 opini Wajar Tanpa Pengecualian (82%), 86 opini Wajar Dengan Pengecualian (16%), dan 13 opini Tidak Memberikan Pendapat (2%), seperti yang disajikan pada Gambar 1.

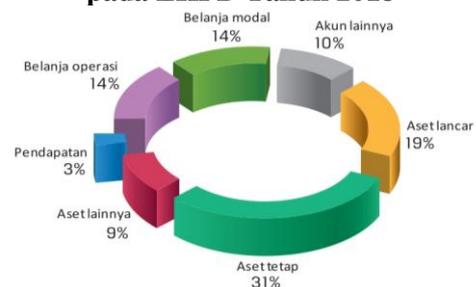
Gambar 1
Grafik Opini LKPD Tahun 2018



Sumber : www.bpk.go.id, 2021

Sebanyak 99 LKPD belum memperoleh opini WTP karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup. Akun-akun yang disajikan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2
Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup pada LKPD Tahun 2018



Sumber : www.bpk.go.id, 2021

Berdasarkan Gambar 2, tiga akun terbesar yang mempengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2018 yaitu aset tetap pada 78 PEMDA antara lain: (1) pencatatan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan belum dilakukan atau tidak akurat; (2) aset tetap tidak diketahui keberadaannya dan dikuasai pihak lain; (3) penambahan aset tetap setelah perolehan belum diatribusikan ke aset induk sehingga berdampak pada perhitungan akumulasi penyusutan. Aset lancar pada 48 PEMDA, antara lain: (1) saldo dana BOS tidak dicatat secara riil dan akurat, serta kas belum disajikan karena belum diverifikasi pertanggungjawabannya secara memadai; (2) piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum seluruhnya diverifikasi dan divalidasi serta penghapusan piutang tidak sesuai dengan ketentuan; dan (3) penyajian saldo persediaan belum mencakup saldo persediaan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Belanja operasi pada 34 PEMDA antara lain: (1) kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa belum dipulihkan dengan penyetoran kas ke daerah; dan (2) belanja pegawai serta belanja barang dan jasa tidak didukung dengan bukti dokumen pencairan yang memadai serta tidak dilengkapi dengan laporan penggunaan dana.

Berdasarkan data opini LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 bisa dilihat bahwa dari 23 LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 11 LKPD yang belum mendapatkan opini WTP yang dikarenakan dalam penyajiannya tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup. Secara umum yang menjadi pengecualian pada LKPD yang mendapat opini WDP antara lain: Kas di Bendahara BOS dengan permasalahan (1) pencatatan saldo kas di bendahara BOS dan belanja BOS belum sesuai

kondisi riil; (2) sekolah penerima dana BOS mempunyai lebih dari satu rekening; (3) sisa kas di bendahara BOS belum dipertanggungjawabkan; (4) saldo kas di bendahara BOS tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang valid; (5) saldo kas di bendahara BOS belum dibuatkan Surat Pengesahan Belanja (SPB); dan (6) verifikasi, monitoring dan evaluasi atas pengelolaan dana BOS belum optimal. Adapun penyajian aset tetap dengan permasalahan (1) aset tetap tercatat secara gabungan, serta biaya perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, peningkatan dan honorarium belum dikapitalisasi ke aset induknya; (2) aset tetap belum direkonsiliasi, belum diinventarisasi, dan tidak diketahui keberadaannya; (3) tanah di bawah jalan, serta tanah di bawah ruas jaringan dan daerah irigasi belum diinventarisasi dan dicatat; (4) terdapat aset tetap yang dicatat dengan nilai 0 (nihil); dan (5) kesalahan perhitungan penyusutan karena kelebihan masa manfaat atas aset tetap. Pernyataan Standar Umum dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), menyatakan bahwa pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan, sejalan dengan yang dikemukakan oleh Pelu (2020) untuk mendukung kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, maka auditor harus didukung oleh kompetensi, karena dengan memiliki kompetensi yang memadai, auditor dapat mengasah sensitivitas (kepekaannya) dalam menganalisis laporan keuangan yang diauditnya sehingga auditor mengetahui apakah didalam laporan keuangan tersebut terdapat tindakan kecurangan atau tidak serta mampu mendeteksi trik-trik rekayasa yang dilakukan dalam melakukan kecurangan tersebut. Pengalaman auditor akan semakin berkembang dengan bertambahnya penugasan audit, adanya diskusi mengenai audit dengan rekan sekerja, dan dengan adanya program pelatihan.

Oleh sebab itu, pengalaman kerja dipandang sebagai satu faktor yang penting dalam memprediksi kinerja auditor (Januarti, 2011). Menurut Fransisco, dkk (2019) menyatakan bahwa pengalaman audit ditunjukkan dengan jam terbang auditor dalam melakukan prosedur audit terkait dengan pemberian opini atas laporan auditnya. Auditor yang telah memiliki banyak pengalaman tidak hanya akan memiliki kemampuan untuk menemukan kekeliruan (*error*) atau kecurangan yang tidak lazim yang terdapat dalam laporan keuangan tetapi juga auditor tersebut dapat memberikan penjelasan yang lebih akurat terhadap temuannya tersebut dibandingkan dengan auditor yang masih dengan sedikit pengalaman. Berdasarkan pernyataan standar umum dalam Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), menyatakan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dari gangguan pribadi maupun eksteren yang dapat mempengaruhi independensinya. Sikap independensi diperlukan auditor agar ia bebas dari kepentingan dan tekanan pihak manapun, sehingga auditor dapat mendeteksi ada tidaknya kecurangan pada perusahaan yang diauditnya dengan tepat, dan setelah kecurangan tersebut terdeteksi, auditor tidak ikut terlibat dalam mengamankan praktik kecurangan tersebut (Putra, 2017). Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah kompetensi auditor eksternal pemerintah, Independensi dan pengalaman auditor eksternal pemerintah berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah ?

KAJIAN TEORI

Teori Perilaku

Dalam teori perilaku menurut Ajzen (1991:197) pandangannya mengenai konsep teori perilaku yang direncanakan (*Theory of Planned Behavior*)

mengasumsikan bahwa manusia biasanya akan berperilaku pantas (*behave in a sensible manner*) sesuai dengan apa yang diinginkan lingkungannya. Berdasarkan teori ini, maka tujuan dan manfaat adalah untuk meramalkan dan memahami pengaruh-pengaruh motivasi perilaku, baik kemauan individu itu sendiri maupun bukan kemauan dari individu itu sendiri. Teori perilaku menurut Januarti (2011) memiliki 3 (tiga) fungsi dasar yaitu:

1. Terkait dengan sikap dasar seseorang, contohnya adalah sikap seseorang terhadap intuisi, orang lain, atau obyek. Teori ini dapat menjelaskan bahwa sikap dasar atau kepribadian seseorang terbentuk atas respon seseorang terhadap lingkungan, obyek dan intuisi. Berkaitan pula dengan hal itu, sikap independensi yang ditunjukkan auditor merupakan suatu sikap dalam menghadapi suatu kasus atau penugasan audit yang diberikan.
2. Menggambarkan pengaruh sosial yang disebut norma subyektif. Berkaitan dengan kemampuan persepsi individu tentang perilaku tertentu yang dipengaruhi oleh penilaian orang lain yang signifikan.
3. Berkaitan dengan isu kontrol, faktor ini berkaitan dengan masa lalu dan persepsi seseorang terhadap seberapa sulit untuk melakukan suatu perilaku, contohnya adalah pengalaman audit dalam melakukan prosedur audit dalam penugasan auditnya.

Berdasarkan ketiga fungsi dasar dari teori perilaku di atas erat kaitannya dengan pengetahuan dan pengalaman juga menjadi faktor penting bagi pendeteksian kecurangan oleh seorang auditor (Nasution, 2012). Pengalaman audit adalah yang diperoleh auditor selama melakukan proses audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang

pernah ditangani menurut (Suraida, 2006).

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi mempelajari tentang proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Muhaliq, 2019).

Menurut Luthans (2005:182), atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses kognitif dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor yang mempengaruhi atau masuk akal terhadap perilaku orang lain. Terdapat dua jenis umum atribusi yang ada pada orang, yaitu atribusi disposisional, yang menganggap perilaku seseorang berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, motivasi atau kemampuan, dan atribusi situasional yang menghubungkan perilaku seseorang dengan faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain.

Teori ini juga mendeskripsikan cara-cara penilaian perilaku seseorang baik yang berasal dari internal atau eksternal (Robbins, 2008). Robbins dan Judge menyatakan bahwa kekuatan internal (atribut personal seperti kemampuan, usaha dan kelelahan) dan kekuatan eksternal (atribut lingkungan seperti aturan) bersama-sama mampu menentukan perilaku manusia.

Teori atribusi dalam penelitian ini, mampu menjelaskan karakteristik independensi. Karakteristik

independensi seorang auditor merupakan salah satu penentu terhadap kualitas hasil audit yang akan dilakukan karena merupakan suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas.

Kompetensi

Menurut Suastika, Dkk (2016) Kompetensi merupakan kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Surat Keputusan MENDIKNAS Nomor 045/U/2002 Tentang Perguruan Tinggi, (2002) tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi mengemukakan “Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melakukan tugasnya di bidang tertentu”.

Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya (Jusup, 2014:365). Kompetensi auditor adalah pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan saksama (Muhaliq, 2019). Kemahiran profesional berarti bahwa seorang auditor dalam menjalankan tugasnya harus dengan tekun dan cermat. Kecermatan tersebut meliputi dokumentasi audit kecukupan bukti, serta ketetapan laporan audit. Secara profesional auditor tidak diperbolehkan untuk bertindak ceroboh yang menimbulkan suatu kesalahan (Elder, 2012).

Kompetensi Menurut Halim (2003:49) terdapat tiga faktor yaitu:

1. Pendidikan formal dalam bidang akuntansi di suatu perguruan tinggi termasuk ujian profesi auditor.
2. Pelatihan yang bersifat praktis dan pengalaman dalam bidang auditing.
3. Pendidikan profesional berkelanjutan selama menekuni karir auditor profesional

Berdasarkan Beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Kompetensi adalah keahlian dan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang auditor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta untuk dapat

memiliki keahlian sebagai seorang auditor seseorang harus memperoleh pendidikan formal serta pelatihan yang memadai.

Kompetensi auditor dalam penelitian ini diukur dengan indikator-indikator yang diadopsi dari penelitian Efendy (2010) dimana disebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Dalam audit pemerintahan, auditor dituntut untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan atau keahlian bukan hanya dalam metode dan teknik audit, akan tetapi segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintah. Selain itu, ada tidaknya program atau proses peningkatan keahlian dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kompetensi.

Independensi

Menurut Mulyadi (2011:26) independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh orang lain, serta merupakan kejujuran dalam diri auditor untuk bersikap objektif dalam merumuskan dan menyatakan pendapat. Mulyadi (1992) dalam Efendy (2010) mendefinisikan independensi sebagai keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain.

Arens, dkk (2012) mengatakan independensi terdiri dari dua komponen yaitu 1) independensi dalam fakta (*independence in fact*) yang merupakan adanya kejujuran yang dimiliki auditor dalam mempertimbangkan fakta-fakta atau terdapat pertimbangan secara objektif, tidak memihak di dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. 2) independensi dalam penampilan (*independence in appearance*) yang artinya adanya kesan dari publik bahwa seorang auditor menerapkan sikap independen.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Independensi adalah sebuah sikap mental yang

dimiliki oleh seorang auditor sebagai pihak yang berdiri secara independen sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil auditnya.

Independensi auditor dalam penelitian ini diukur dengan indikator-indikator yang diadopsi dari penelitian Efendy (2010) dimana disebutkan bahwa auditor yang independen haruslah auditor yang tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan atau gangguan yang berasal dari luar maupun dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan.

Pengalaman Audit

Menurut Menurut Suastika, Dkk (2016) pengalaman merupakan sesuatu yang pernah dialami, dijalani, dirasai, ditanggung, dan sebagainya. Ajeng (2016) menyatakan bahwa pengalaman merupakan gabungan dari semua yang diperoleh melalui interaksi yang dilakukan secara berulang-ulang dengan sesama benda alam, keadaan, gagasan, dan penginderaan.

Widiyastuti (2016) mendefinisikan pengalaman auditor sebagai ukuran tentang lama waktu atau masa kerja dan banyaknya penugasan yang telah dilalui oleh seorang dalam memahami tugas-tugas pekerjaannya dengan baik. Hilmi, (2011) mengemukakan bahwa pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja. Semakin sering auditor melakukan pekerjaan yang sama, semakin cepat dan terampil auditor dalam melakukan pekerjaannya.

Menurut Ansah dalam Putra (2017) pengalaman audit ditunjukkan dengan jam terbang auditor dalam melakukan prosedur audit terkait dengan pemberian opini atas laporan auditnya. Auditor yang telah memiliki banyak pengalaman tidak hanya akan memiliki kemampuan untuk menemukan kekeliruan (*error*) atau kecurangan (*fraud*) yang tidak lazim yang terdapat dalam laporan keuangan tetapi juga auditor tersebut dapat memberikan

penjelasan yang lebih akurat terhadap temuannya tersebut dibandingkan dengan auditor yang masih dengan sedikit pengalaman.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengalaman audit merupakan rentang waktu atau masa yang telah dijalani oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebagai seorang auditor dan diwaktu yang bersamaan dapat mengasah kemampuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan atau kecurangan. Pengalaman audit dalam penelitian ini diukur dengan indikator-indikator yang diadopsi dari penelitian Biska dan Wiratmaja (2016) dimana disebutkan bahwa pengalaman auditor sebagai ukuran tentang lama waktu atau masa kerja dan banyaknya penugasan yang telah dilalui oleh seorang.

Pendeteksian Kecurangan

Kecurangan merupakan suatu istilah yang umum dan mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan keahlian tertentu yang dipilih oleh seorang individu maupun kelompok untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah (Missa, 2020). Vona (2008:6) mendefinisikan kecurangan sebagai tindakan yang dilakukan didalam organisasi, atau oleh organisasi, atau terhadap organisasi. Tindakan tersebut dilakukan oleh pihak dalam ataupun pihak luar secara sengaja dan terselubung.

Endiana (2019) mendefinisikan kecurangan merupakan suatu istilah yang umum, dan mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan keahlian tertentu, yang dipilih oleh seorang individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah. Pengertian kecurangan (*fraud*) menurut Tugiman (2006:3) adalah suatu penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu. Menipu atau memberikan yang keliru untuk keuntungan pribadi atau kelompok

secara tidak *fair* baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kecurangan merupakan berbagai macam kecerdikan individu maupun kelompok yang direncanakan dan dilakukan guna mendapatkan keuntungan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Dengan kata lain kecurangan adalah penipuan yang disengaja untuk mendapatkan hak atau aset dari pihak lain.

Jenis-Jenis Kecurangan

Secara skematis, *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* menggambarkan *fraud* atau kecurangan dalam bentuk *fraud tree* atau pohon *fraud*. Skema ini menggambarkan cabang-cabang *fraud* dalam hubungan kerja beserta ranting dan anak rantingnya masing-masing. Adapun *fraud tree* atau pohon *fraud* dalam *occupational fraud* (hubungan kerja) secara umum *fraud* (kecurangan) terbagi dalam tiga, yaitu:

a. Korupsi

Korupsi mencakup beberapa hal seperti konflik kepentingan rekan atau keluarga dalam proyek (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), pengambilan dana secara paksa (*economic extortion*), permainan dalam tender dan gratifikasi terselubung (*illegal gratuities*).

b. Pengambilan aset secara illegal

Pengambilan aset secara illegal ini maksudnya adalah pengambilan aset secara tidak sah atau melawan hukum. Adapun pengambilan aset secara ilegal mencakup (1) *Skimming* atau penjarahan yaitu uang dijajah sebelum masuk kas perusahaan atau dengan kata lain, dana diambil sebelum adanya pembukuan; (2) *Lapping* atau pencurian yaitu uang dijajah sesudah masuk kas perusahaan. Contohnya seperti

pembebanan tagihan yang tidak sesuai dengan kenyataan, pembayaran biaya-biaya yang tidak logis serta pemalsuan cek; (3) *Kitting* atau penggelapan dana yaitu adanya bentuk penggelembungan dana, atau adanya dana mengambang (*free money*).

- c. Pernyataan Palsu atau Salah Pernyataan
Pernyataan palsu atau salah Pernyataan meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan.

Konsep Segitiga Kecurangan (*fraud triangle*)

Menurut Muhalip (2019) salah satu pertimbangan penting yang harus dilakukan oleh seorang auditor dalam mengungkap kecurangan adalah dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kecurangan dan yang meningkatkan resiko kecurangan terjadi. Arens,dkk (2012:375) menjelaskan bahwa terdapat *fraud triangle* yang berisi mengenai tiga kondisi penyebab terjadinya kecurangan yaitu sebagai berikut:

- a. Tekanan (*Pressure*)
Tekanan merupakan situasi dimana seseorang merasa atau memiliki kebutuhan untuk melakukan kecurangan, pengaruh desakan dalam pikiran dan keinginan inilah yang menjadi kekuatan moral.
- b. Peluang (*Opportunity*)
Peluang merupakan situasi dimana seseorang percaya adanya kemungkinan untuk melakukan kecurangan dan percaya bahwa kecurangan tersebut tidak terdeteksi. Kecurangan yang disebabkan oleh peluang dapat terjadi karena pengendalian internal yang

lemah, manajemen pengawasan yang kurang baik dan penggunaan posisi.

- c. Rasionalisasi (*Rationalization*)
Rasionalisasi merupakan kondisi dimana seseorang yang telah melakukan kecurangan mencari pembenaran atas tindak kejahatan yang telah dilakukannya. Rasionalisasi biasanya dimulai dengan jumlah yang sedikit dan berkembang terus-menerus. Selain itu pelaku kecurangan biasanya beranggapan bahwa apa yang telah diberikan pada perusahaan jauh lebih besar daripada apa yang diambil dari perusahaan.

Pendeteksian Kecurangan

Kumaat (2011:156) mengemukakan bahwa mendeteksi fraud adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak fraud, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku fraud (yaitu ketika pelaku menyadari prakteknya telah diketahui, maka sudah terlambat untuk berkelit).

Menurut *Pusdiklatwas BPKP*. (2008) tujuan dalam mendeteksi kecurangan, yaitu untuk mengetahui bahwa kecurangan telah terjadi (ada), apakah perusahaan ataupun organisasi menjadi korban atau sebagai pelaku kecurangan, adanya kelemahan dalam pengendalian internal serta moral pelaku yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan, dan adanya kondisi lingkungan perusahaan ataupun organisasi yang menyebabkan terjadinya kecurangan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendeteksian kecurangan merupakan tindakan untuk mendapatkan indikasi bahwa telah terjadi tindakan kecurangan dalam perusahaan atau instansi guna mencegah pelaku kecurangan melakukan praktik kecurangan di masa mendatang.

Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dalam penelitian ini diukur dengan indikator-indikator yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan Muhalip (2019) yaitu sebagai berikut:

- a. Pemahaman atas Tugas Pokok dan Fungsi Instansi
Pemahaman auditor atas proses kegiatan instansi merupakan suatu langkah awal dalam mendeteksi kecurangan. Sebelum melaksanakan pendeteksian kecurangan, auditor dituntut untuk memahami proses kinerja dan mekanisme pertanggungjawaban pada suatu unit. Selanjutnya, auditor mempertimbangkan apakah tingkat pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi instansi telah cukup memadai bagi auditor untuk melakukan suatu analisis potensi-potensi kecurangan atau masih memerlukan informasi lanjutan dalam rangka melengkapi pengetahuan dasar serta latar belakang terjadinya indikasi tindak kecurangan. Pengetahuan dan pemahaman dalam tahap informasi awal ini akan menjadi dasar perencanaan penugasan audit kecurangan. Pemahaman akan kian tajam sehingga auditor pun semakin dapat menentukan bentuk penyimpangan, pihak yang terkait, bukti-bukti yang diperlukan, dan dimana bukti tersebut berada. Selain itu, auditor juga akan dapat melihat penyebab munculnya penyimpangan.
- b. Pemahaman Sistem Pengendalian Intern.
Auditor harus memahami pengendalian intern auditee, yang berkaitan dengan tingkat keandalannya sekaligus mengidentifikasi kelemahannya. Hal ini penting untuk melihat latar belakang terjadinya indikasi tindak kecurangan dan pertimbangan risiko kemungkinan terjadinya tindak kecurangan.

Evaluasi terhadap pengendalian intern, secara umum berkaitan dengan risiko pelaksanaan audit. Dalam audit kecurangan, evaluasi ini lebih diarahkan kepada risiko berkaitan dengan terjadinya suatu tindak kecurangan. Semakin lemah pengendalian intern dari instansi, maka dugaan adanya tindak kecurangan akan semakin kuat.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Diduga kompetensi berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.
H2: Diduga independensi berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.
H3: Diduga pengalaman audit berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.
H4: Diduga kompetensi, independensi, dan pengalaman audit berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yang digunakan berupa data opini Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang jumlah dan persentase opininya telah tergabung dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI, profil dan sejarah dari Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan data kuantitatif yang digunakan adalah data jumlah auditor pada BPK perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 dan jawaban dari kuesioner yang diisi oleh responden.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berjumlah 112 auditor yang terdiri dari yang terdiri dari

6 orang pemeriksa madya, 26 orang pemeriksa muda, dan 80 orang pemeriksa pertama. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling*, dimana setiap populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Sehingga sampel dalam penelitian ini yang dihitung menggunakan rumus slovin adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{112}{1 + 112(0,1)^2} = 52,83$$

Jadi, dalam penelitian ini menggunakan sampel dengan jumlah sebanyak 53 orang (dibulatkan) yang merupakan auditor di Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 25. Persamaan yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y	=	Kemampuan Mendeteksi Kecurangan
α	=	Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$	=	Koefisien regresi berganda
X_1	=	Kompetensi
X_2	=	Independensi
X_3	=	Pengalaman
ϵ	=	Standar Error

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini terbagi dua yaitu uji hipotesis secara simultan (uji F) dan uji hipotesis secara parsial (uji t).

a. Uji F bertujuan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengambilan kesimpulan terhadap hipotesis sebagai berikut:

1) Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau angka signifikansi $>$ taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$) maka variabel independen secara simultan (bersama-sama) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2) Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau angka signifikansi $<$ taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$) maka variabel independen secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengambilan kesimpulan terhadap hipotesis sebagai berikut:

1) Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau angka signifikansi $>$ taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$) maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2) Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau angka signifikansi $<$ taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$) maka variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya (Ghozali, 2011:97). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi (R²) berarti semakin tinggi kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kompetensi terhadap Pendeteksian Kecurangan

Hipotesis pertama menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel kompetensi adalah 0,151. Nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan *p value* 0,044.

Hasil ini didukung oleh hasil perhitungan nilai $t_{hitung} 2,065 > t_{tabel} 2,011$. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan pendapat De Angelo (1981) dalam Efendy (2010) bahwa kemungkinan (*probability*) dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi). Hasil penelitian ini sejalan pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pelu,dkk 2016) yang menyatakan bahwa apabila seorang auditor memiliki kompetensi yang tinggi maka auditor akan lebih mudah dalam menyelesaikan tugasnya. Sehingga auditor mampu meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan audit secara efektif. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Fransisco, dkk (2019) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi terhadap pendeteksian kecurangan. Berdasarkan hasil tersebut dapat dipahami bahwa dalam mendeteksi kecurangan, seorang auditor bergantung pada tingkat kompetensinya. Jika auditor memiliki kompetensi yang baik maka auditor akan dengan mudah mendeteksi kecurangan yang terdapat dalam laporan keuangan yang diauditnya dan sebaliknya jika rendah maka dalam melaksanakan tugasnya, auditor akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam pendeteksian kecurangan.

Pengaruh Independensi terhadap Pendeteksian Kecurangan

Hipotesis kedua menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel independensi adalah 0,111. Nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan *p value* 0,167. Hasil ini didukung oleh hasil perhitungan nilai $t_{hitung} 1,403 < t_{tabel} 2,011$. Hal ini menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh

signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Samelson, dkk. (2006) yang menyimpulkan bahwa independensi tidak mempunyai hubungan dengan kualitas audit. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Efendy (2010) dan Pratama,dkk (2019) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara independensi terhadap pendeteksian kecurangan dikarenakan independensi auditor masih terpengaruh dengan penentu kebijakan dan sering adanya mutasi antar satuan kerja perangkat daerah. Akibatnya, meskipun auditor mengalami gangguan independensi, namun auditor tetap menganggap bahwa audit yang baik tetap harus dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan yang terjadi pada Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan provinsi Nusa Tenggara Timur yang selama beberapa tahun terakhir melakukan mutasi guna peningkatan kinerja. Hal ini diperkuat oleh teori atribusi yang mempelajari tentang proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Terdapat dua jenis umum atribusi yang ada pada orang, yaitu atribusi disposisional, yang menganggap perilaku seseorang berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, motivasi atau kemampuan, dan atribusi situasional yang menghubungkan perilaku seseorang dengan faktor eksternal seperti aturan atau pengaruh sosial dari orang lain.

Pengaruh Pengalaman Audit terhadap Pendeteksian Kecurangan

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa pengalaman audit berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel kompetensi adalah 0,310. Nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan *p value* 0,000. Hasil ini didukung oleh hasil perhitungan nilai $t_{hitung} 4,265 > t_{tabel} 2,011$. Hal ini menunjukkan bahwa

kompetensi berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan.

Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan pendapat (Nirmala, 2013) Ansah (2017) yang menyatakan bahwa auditor yang telah memiliki banyak pengalaman tidak hanya akan memiliki kemampuan untuk menemukan kekeliruan (*error*) atau kecurangan (*fraud*) yang tidak lazim yang terdapat dalam laporan keuangan tetapi juga auditor tersebut dapat memberikan penjelasan yang lebih akurat terhadap temuannya tersebut dibandingkan dengan auditor yang masih dengan sedikit pengalaman. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) dan Atmaja (2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengalaman audit terhadap pendeteksian kecurangan.

Berdasarkan hasil tersebut dapat dipahami bahwa dalam mendeteksi kecurangan, seorang auditor sangat bergantung pada tingkat pengalaman auditnya. Jika auditor memiliki pengalaman audit yang baik maka auditor akan dengan mudah mendeteksi kecurangan yang terdapat dalam laporan keuangan yang diauditnya.

Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Pengalaman Audit terhadap Pendeteksian Kecurangan

Hipotesis keempat menyatakan bahwa kompetensi, independensi, dan pengalaman audit secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Hasil pengujian statistik uji F (simultan) bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} yakni sebesar $51,445 > 3,20$ dan nilai signifikansi antara variabel kompetensi, independensi, dan pengalaman audit sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa kompetensi, independensi, dan pengalaman audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Hal ini berarti semakin tinggi kompetensi, independensi, dan

pengalaman audit yang dimiliki oleh seorang auditor maka semakin baik tingkat pendeteksian kecurangan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi, independensi, dan pengalaman audit terhadap pendeteksian kecurangan.

Besarnya pengaruh variabel kompetensi, independensi, dan pengalaman audit dapat diketahui dengan melihat nilai R^2 pada pengujian koefisien Determinasi (R^2) diperoleh nilai sebesar 0,767 atau 76,7%. Hal ini dapat menjelaskan bahwa kompetensi, independensi, dan pengalaman audit dapat menjelaskan pendeteksian kecurangan sebesar 76,7% dan sisanya sebesar 23,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian. Variabel-variabel lain tersebut antara lain tekanan waktu, objektivitas, skeptisme profesional dan etika profesi. Nirmala (2013) mengemukakan bahwa tekanan waktu adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun yang sangat ketat dan kaku. Bimantara (2018) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa objektivitas berpengaruh dalam pendeteksian kecurangan karena objektivitas merupakan salah satu faktor dari prinsip integritas yang harus dipegang teguh oleh pemeriksa. Penelitian yang dilakukan Biska (2016) mengemukakan bahwa skeptisme profesional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian kecurangan karena skeptisme profesional membuat auditor tidak mudah percaya terhadap asersi manajemen sehingga meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi kecurangan. Andini (2019) mengemukakan bahwa etika profesi berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan karena etika seorang auditor memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan, dimana auditor

harus memegang komitmen dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang auditor.

KESIMPULAN

Hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya terkait pengaruh kompetensi, independensi, dan pengalaman audit terhadap pendeteksian kecurangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan, seperti yang dikemukakan De Angelo (1981) dalam Efendy (2010) bahwa kemungkinan (*probability*) dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi).
2. Independensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendeteksian, sejalan dengan yang dikemukakan Pratama,dkk (2019) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara independensi terhadap pendeteksian kecurangan dikarenakan independensi auditor masih terpengaruh dengan penentu kebijakan dan sering adanya mutasi antar satuan kerja perangkat daerah.
3. Pengalaman audit berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan, sejalan dengan pendapat Ansah (2017) yang menyatakan bahwa auditor yang telah memiliki banyak pengalaman tidak hanya akan memiliki kemampuan untuk menemukan kekeliruan (*error*) atau kecurangan (*fraud*) yang tidak lazim yang terdapat dalam laporan keuangan
4. Kompetensi, independensi, dan pengalaman audit secara simultan berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) yang menyatakan bahwa terdapat

pengaruh yang signifikan antara kompetensi, independensi, dan pengalaman audit terhadap pendeteksian kecurangan.

5. Limitasi dan Studi Lanjutan

1. Jumlah responden yang hanya 53 orang, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya
2. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya.
3. Dalam penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengambil sampel yang lebih banyak, hal ini bertujuan untuk keakuratan data yang lebih baik dalam penelitiannya.
4. Diharapkan adanya tambahan variabel lain yang mungkin juga mempengaruhi banyak hal dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The Theory Of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes*.
- Arens, A. A., dan Loebbecke, K. J. (2012). *Auditing: Pendekatan Terpadu*. Erlangga.
- Biska, I. A. I., dan Wiratmaja, N. I. D. (2016). Pengaruh Pengalaman, Independensi, Skeptisme Profesional Auditor pada Pendeteksian Kecurangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(3).
- Elder, R. J. (2012). *Jasa Audit dan Assurance*. Salemba Empat.
- Fransisco, Fransiskus, Indri, Pordinan, Rara, Rizqi, Zulmanto, dan Umar, H. (2019). Pengaruh Kompetensi,

- Independensi dan Tekanan Waktu Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan dengan Skeptisme Profesional Sebagai Variabel Intervening. *Prosiding Seminar Nasional Pakar. Prosiding Seminar Nasional Pakar.*
- Halim, A. (2003). *Auditing 1 (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan)*. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Hilmi, F. (2011). Pengaruh Pengalaman, Independensi dan Skeptisme Profesional Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan. *Prodi Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.*
- Januarti, I. (2011). Analisis Pengaruh Pengalaman Auditor, Komitmen Profesional, Orientasi Etis dan Nilai Etika Organisasi Terhadap persepsi dan Pertimbangan Etis. *Simposium Nasional Akuntansi XIV.*
- Luthans, F. (2005). *Perilaku Organisasi*. Penerbit Andi.
- Missa, P. F. (2020). Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Karyawan di Bidang Akuntansi tentang Fraud. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 2(105).
- Muhaliq. (2019). Pengaruh Kompetensi, Skeptisme Profesional dan Pertimbangan Risiko Terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara. *Tesis. Kendari: Universitas Halu Oleo.*
- Nasution, H. (2012). Pengaruh beban Kerja, Pengalaman Audit dan Tipe Kepribadian Terhadap Skeptisme Profesional dan Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. *Universitas Indonesia.*
- Nirmala, dan N. C. (2013). Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due Profesional Care, Akuntabilitas, Kompleksitas Audit, dan Time Budget Pressure terhadap Kualitas Audit. *Journal of Accounting*, 2(3).
- Pelu, M. F. A., Muslim, dan N. (2016). Pengaruh Kompetensi, Skeptisme Profesional Auditor dan Tekanan Anggaran Waktu terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi. *Ekonomika*, 4, 1. *Pusdiklatwas BPKP. (2008). Etika Dalam Fraud Audit. Jakarta: BPKP. (n.d.).*
- Putra, T. A. P. S. 2. (2017). Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Pengalaman Auditomerintah (APIP) terhadap Pender Aparat Pengawas Intern Peteksian Fraud dengan Skeptisisme Profesional sebagai Variabel Intervening pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau. *Coopetition*, 8(1).
- Robbins, S. dan T. (2008). *Perilaku Organisasi* (12th ed.). Salemba Empat.
- Suraida, I. (2006). Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit dan Risiko Audit terhadap Skeptisme Profesional Auditor dan Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik. *Sosiohumaniora*, 7(3).
- Surat Keputusan MENDIKNAS Nomor 045/U/2002 tentang Perguruan Tinggi, (2002).
- Vona, L. (2008). *Fraud Risk Assessment: Building a Fraud Audit Program John Wiley and Sons, Inc.*
- Widiyastuti, M. dan Pamudji, S. (2016). Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud). *Jurnal UNIMUS*, 5(2).